**Dokumen Analisa Sistem Penggajian PNS (2015)**

*Disusun oleh Muhammad Sultoni*

*Senin, 6 Agustus 2018*

1. **Pegawai negeri di Indonesia**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Anggota Tentara Nasional Indonesia
4. **Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari:**

**1. Pegawai Negeri Sipil Pusat**

1. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi/Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.
2. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan.
3. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.
5. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lain, seperti hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan lain-lain.

**2. Pegawai Negeri Sipil Daerah**

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di daerah otonom seperti daerah provinsi/kabupaten/kota dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dipekerjakan pada pemerintah daerah maupun dipekerjakan di luar instansi induknya.

1. **Jabatan kepemerintahan berstatus Pegawai Negeri Sipil**

**1. Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara**

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai [ASN](https://id.wikipedia.org/wiki/ASN) pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan [Pejabat Pembina Kepegawaian](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pejabat_Pembina_Kepegawaian&action=edit&redlink=1) dan berkoordinasi dengan [Komisi Aparatur Sipil Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Aparatur_Sipil_Negara).

**2. Jabatan Struktural**

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan struktural juga merupakan jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon V) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka

1. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
2. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
3. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
4. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
5. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
6. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana,

**3. Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional menurut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berorientasi pada prestasi kerja, sehingga tujuan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dicapai.

**D. Daftar Golongan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Indonesia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Golongan** | **Pangkat** |
| I/a | Juru Muda |
| I/b | Juru Muda Tingkat I |
| I/c | Juru |
| I/d | Juru Tingkat I |
| II/a | Pengatur Muda |
| II/b | Pengatur Muda Tingkat I |
| II/c | Pengatur |
| II/d | Pengatur Tingkat I |
| III/a | Penata Muda |
| III/b | Penata Muda Tingkat I |
| III/c | Penata |
| III/d | Penata Tingkat I |
| IV/a | Pembina |
| IV/b | Pembina Tingkat I |
| IV/c | Pembina Utama Muda |
| IV/d | Pembina Utama Madya |
| IV/e | Pembina Utama |

**E. KOMPONEN GAJI PNS**

Besaran gaji PNS Per Bulan tentunya tidak sama antara PNS yang satu dengan yang lainnya. Besaran penghasilan yang diterima oleh PNS ini tergantung kepada:

**1. Status**

Seorang PNS yang sudah menikah tentu gajinya berbeda dengan PNS yang belum menikah, karena bagi PNS yang sudah menikah akan mendapatkan tunjangan istri/suami. Begitu juga antara PNS yang sudah punya anak dan yang belum pastinya gaji yang diterima berbeda, karena adanya Tunjangan anak bagi PNS yang sudah mempunyai anak.

**2. Jabatan**

Jabatan seorang PNS juga mempengaruhi gaji atau penghasilan yang diterimanya. Seorang PNS dengan jabatan fungsional umum, fungsional tertentu, atau struktural, akan mendapatkan gaji bulanan yang berbeda karena adanya Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Jabatan Fungsional, atau Tunjangan Jabatan Struktural.

Selain itu, jabatan PNS juga mempengaruhi tunjangan kinerja. Beda jabatan terkadang berefek juga kepada perbedaan tunjangan kinerja yang diterimanya, tergantung kelas jabatannya.

**3. Golongan & Masa Kerja**

Faktor penentu penghasilan PNS yang ketiga adalah golongan dan masa kerja. Seseorang dengan golongan dan masa kerja tertentu berbeda gajinya dengan orang lain yang berbeda golongan dan masa kerjanya.

**4. Tingkat Kehadiran**

Tingkat kehadiran pegawai juga berpengaruh terhadap penghasilan yang diterimanya. Pengaruh yang pertama adalah terhadap uang makan. PNS yang tidak hadir kerja di hari kerja tidak akan diberikan uang makan.

Selain itu, tingkat kehadiran juga berpengaruh terhadap tunjangan kinerja yang diterimanya. Jika sering bolos atau terlambat datang atau pulang terlalu cepat, tentunya tunjangan kinerjanya makin kecil.

Dengan keempat faktor di atas, maka akan sangat jarang kita jumpai seorang PNS yang mempunyai penghasilan yang sama persis tiap bulannya.

1. **Tingkat Kehadiran**

Selanjutnya, komponen penghasilan yang diterima oleh PNS terdiri atas:

1. Gaji Induk (Gaji Bulanan)
2. Tunjangan Kinerja
3. Uang Makan
4. Honor
5. Komponen penghasilan lainnya.

**F. SISTEM PERHITUNGAN GAJI PNS**

Setiap bulan seorang karyawan menerima gaji bulanan yang dibayarkan melalui rekening masin masing

Adapun komponen gaji yang diterima terdiri dari :

1. Gaji Pokok.
2. Tunjangan Istri/Suami (10% dari gaji pokok).
3. Tunjangan Anak (2% dari gaji pokok, maksimal 2 anak).
4. Tunjangan Umum/Tunjangan Jabatan Fungsional/Tunjangan Jabatan Struktural.
5. Tunjangan Beras.
6. Pembulatan.
7. Tunjangan PPh.

Lalu dipotong dengan:

1. PPh Pasal 21.
2. IWP 10% dari (Gaji Pokok + Tunjangan Istri/Suami + Tunjangan Anak).
3. Iuran Taperum.
4. Tunggakan
5. Hutang
6. Sewa Rumah
7. Potongan Beras
8. Lain-lain

**1. Gaji Pokok**

Gaji pokok bertambah setiap 2 tahun sebesar 3.15 % dari gaji pokok tahun sebelumnya

Perkiraan Gaji Pokok PNS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Golongan | | Gaji Pokok Awal |
| Golongan I | a | Rp 1.486.500 |
| b | Rp 1.623.400 |
| c | Rp 1.692.100 |
| d | Rp 1.763.600 |
| Golongan II | a | Rp 1.926.000 |
| b | Rp 2.103.300 |
| c | Rp 2.192.300 |
| d | Rp 2.285.000 |
| Golongan III | a | Rp 2.456.700 |
| b | Rp 2.560.600 |
| c | Rp 2.668.900 |
| d | Rp 2.781.800 |
| Golongan IV | a | Rp 2.899.500 |
| b | Rp 3.022.100 |
| c | Rp 3.149.900 |
| d | Rp 3.283.200 |
| e | Rp 3.422.100 |

**2. Tujangan Suami/Istri**

Seorang PNS yang memiliki suami / istri mendapat tunjangan sebesar *10%* dari *gaji pokok*

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
| Gaji Pokok | Rp. 2.400.000 |
| Tunjangan Suami Istri : | 10% x Rp. 2.400.000 = Rp. 240.000 |

**3. Tujangan Anak**

Seorang PNS yang memiliki anak mendapat tunjangan sebesar *2%* dari *gaji pokok* per anak dengan ketentuan maksimal anak yang mendapat tunjangan sebanyak 2 orang.

Contoh jika memiliki 3 anak :

|  |  |
| --- | --- |
| Gaji Pokok | Rp. 2.400.000 |
| Tunjangan Suami Istri : | 2 x (2% x Rp. 2.400.000) = Rp. 96.000 |

**4. Tujangan Umum**

Jika seorang PNS memiliki Jabatan Fungsional Umum sehingga kepadanya diberikan Tunjangan Umum. Adapun besaran tunjangan umum disesuaikan dengan golongan:

|  |  |
| --- | --- |
| Golongan | Besar Tunjangan |
| I | Rp. 190.000 |
| II | Rp. 185.000 |
| III | Rp. 180.000 |
| IV | Rp. 175.000 |

**5. Tujangan Beras**

Seorang PNS akan mendapat tunjangan beras sebanya 10KG untuk setiap anggota keluarga (istri & anak) dengan ketentuan maksimall 2 orang anak yang mendapat tunjangan.

Contoh jika menikah dan memiliki 2 anak:

|  |
| --- |
| 4 x (10 x *Harga Beras*) |

**6. Tujangan PPh**

Seorang PNS akan mendapat tunjangan PPh (Pajak Penghasilan) sehingga tidak perlu membayar PPh, dalam kata lain PPh ditanggung Pemerintah. Besar Tunjangan sama dengan besar PPh.

**7. Tunjangan Tambahan Umum**

Seorang PNS akan mendapat tunjangan Tambahan umum jika (Gaji Pokok + Tunjangan Kel + Tunjangan Umum + Tunjangan Beras) Kurang Dari Rp. 2.000.000. Tunjangan yang didapat berupa pembulatan ke angka 2.000.000

**8. Tunjangan Papua**

Seorang PNS akan mendapat tunjangan Pulau Papua jika ditugaskan di Pulau Papua, tunjangan yang didapat sebesar :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Golongan | | Besarnya Tunjangan (rupiah) |
| Golongan I | a | 200.000 |
| b | 225.000 |
| c | 250.000 |
| d | 275.000 |
| Golongan II | a | 300.000 |
| b | 325.000 |
| c | 350.000 |
| d | 375.000 |
| Golongan III | a | 425.000 |
| b | 450.000 |
| c | 475.000 |
| d | 500.000 |
| Golongan IV | a | 525.000 |
| b | 550.000 |
| c | 575.000 |
| d | 600.000 |
| e | 625.000 |

**8. Tunjangan Pulau Terpencil**

Seorang PNS akan mendapat tunjangan Pulau Terpencil jika ditugaskan di Luar Pulau Selain Pulau Jawa, Sumatera, Bali & Manado tunjangan yang didapat sebesar 100% dari Gaji Pokok.

**9. Tunjangan Fungsional**

Tunjangan Fungsional didapat jika seorang pns memiliki profesi fungsional. Adapun dana yang didapat sebesar Rp. 1.350.000

**10. Tunjangan Struktural**

Tunjangan Fungsional didapat jika seorang pns memiliki jabatan structural pemerintahan. Dana yang didapat disesuaikan dengan Eselon.

**11. Tunjangan Lain-lain**

Seorang PNS akan mendapat tunjangan lain-lain apa bila diperlukan untuk menunjang keperluannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya.

**12. Biaya Jabatan**

Biaya jabatan dipotong dari Gaji Kotor (Gaji Pokok + Tunjangan) sebesar 5% dari Gaji Kotor

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
| Gaji Kotor | Rp. 5.500.000 |
| Tunjangan Suami Istri : | 5% x Rp. 5.500.000 = Rp. 275.000 |

**13. Biaya Pensiun**

Biaya jabatan dipotong dari Gaji Kotor (Gaji Pokok + Tunjangan) sebesar 4.75% dari Gaji Pokok + Tunjangan Suami Istri + Tunjangan anak

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
| Gaji Pokok | Rp. 5.000.000 |
| Tunjangan Suami Istri | Rp. 500.000 |
| Tunjangan Anak | Rp. 200.000 |
| Tunjangan Umum | Rp. 190.000 |
| Gaji Kotor | Rp. 5.890.000 |
| Biaya Pensiun | 4.75% x ( Rp. 5.700.000 ) = Rp 270.750 |

**14. PTKP & PKP**

PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) adalah total pendapatan yang bebas pajak

1. Rp36.000.000,- untuk WP Pribadi
2. Rp3.000.000,- untuk WP Kawin
3. Rp36.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
4. Rp3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis

Sedangkan PKP (Pendapat Kena Pajak) adalah sisa dari *Pendapatan Bersih Pertahun* (Gaji Bersih x 12) dikurangi PTKP

Contoh :

|  |  |
| --- | --- |
| Gaji Bersih | Rp. 4.000.000 |
| Gaji Bersih Pertahun | Rp. 48.000.000 |
| PTKP | Rp. 36.000.000 |
| PKP | Rp. 48.000.000 – Rp. 36.000.000 = Rp. 12.000.000 |
| Gaji Kotor | Rp. 5.890.000 |

**15. PPh**

PPh (Pajak Penghasilan) adalah pajak yang ditentukan dari jumlah PKP dan hanya dikenakan pada PNS yang memiliki PKP. Adapun aturan perhitungan Jumlah PPh sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah PKP | Tarif |
| Rp. 0 - Rp. 50.000.000 | 5% |
| Rp. 50.000.001 - Rp. 250.000.000 | 15% |
| Rp. 250.000.001 - Rp. 500.000.000 | 25% |
| Rp. 500.000.001 | 30% |

*Keterangan : PPh berlaku secara kelipatan jika Jumlah PKP memenuhi lebih dari 1 Tarif PKP*

**16. IWP**

IWP (Iuran Wajib Pajak) adalah 10% dari (Gaji Pokok + Tunjangan Istri/Suami + Tunjangan Anak) yang di potong dari Pendapatan Kotor.

**17. Sewa Rumah**

Potongan Sewa rumah hanya dikenakan pada anggota PNS yang menempati rumah dinas milik pemerintah. Adapun besar potongan yang dikenakan adalah Rp 400.000 per bulan.

**18. Sewa Rumah**

|  |  |
| --- | --- |
| Golongan | Besar Tunjangan |
| I | Rp. 10.000 |
| II | Rp. 7.000 |
| III | Rp. 5.000 |
| IV | Rp. 3.000 |

**Daftar Pustaka**

*http://www.onepoin.co.id/2016/04/inilah-isi-rpp-sistem-penggajian-pns.html*

*https://www.liputan6.com/bisnis/read/3356869/gaji-pns-bakal-berubah-ini-daftar-lengkapnya*

*https://www.gajibaru.com/2015/11/jabatan-aministrasi-fungsional-pimpinan-tinggi.html*

*https://id.wikipedia.org/wiki/Jabatan\_Pimpinan\_Tinggi\_Aparatur\_Sipil\_Negara*

*https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai\_negeri*

*PP No.30 tahun 2015 Perubahan Ketujuh Belas Gaji PNS*